

RENCANA KERJA (RENJA) 2024



**DINAS PERIKANAN KABUPATEN
MALINAU**

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas Berkah dan RahmatNya, maka penulisan dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Perikanan pada tahun- tahun yang sebelumnya.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2024 akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan yang beroreantasi pada peningkatan produksi dan produktivitas serta dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya dan nelayan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan adanya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau diharapkan Dinas Perikanan kabupaten Malinau dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan Kabupaten Malinau.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan diharapkan dapat mampu dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, terakomodasi dan berkesinambungan, sehingga progran 5 (lima) tahun mendatang dapat mencapai hasil optimal.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik saran dari semua pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan dalam penyusunan Renja ini lebih sempurna.

Kepala Dinas



Muhamad Kadri, S.Sos., M.Si

Nip. 19670717 199803 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun lalu.....	5
2.1. A. Pengolahan Data dan Informasi.....	5
2.1.B. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian	
Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Malinau.....	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan.....	18
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	33
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau	35
3.3. Program dan Kegiatan	37
BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	43
BAB V. Penutup	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
 Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau

Tabel 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2024 dan perkiraan Maju
 Tahun 2025

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024.....

GAMBAR

Gambar 1.1
Gambar Pohon Masalah.....
Gambar Pohon Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perikanan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Dinas Perikanan merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari visi, misi dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam, KUA dan PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Rencana Kerja Dinas Perikanan salah satu instrumen program / kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan perangkat Daerah tahun 2024 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana umum Perencanaan Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan

merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Malinau 2021-2026 Yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional**”, maka dapat diwujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Perikanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Perikanan yang telah tercantum dalam PPAS dan KUA digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Konsepsi Perencanaan Pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau dan Renstra SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, memuat kerangka Pembangunan Perikanan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, meletakkan Renstra SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Malinau sebagai acuan dalam melaksanakan Pembangunan Perikanan di Kabupaten Malinau.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Nomor 28.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 61.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
18. Keputusan Bupati Nomor 050 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana

Kerja Perangkat Daerah Kab. Malinau Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Perikanan Tahun 2024 sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan/ program kegiatan tahun 2025 dan percepatan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan adalah untuk memasukan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1. LATAR BELAKANG
		1.2. LANDASAN HUKUM
		1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
		1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II	:	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2025
		2.1.a PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
		2.1.b EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
		2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
		2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARA TUGAS DAN FUNGSI SKPD
		2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
		2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
		3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
BAB III	:	3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
		3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	:	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.A. Pengolahan Data dan Informasi

Dinas Perikanan mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di bidang Usaha Perikanan, Bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dinas Perikanan Kabupaten dalam melaksanakan Tugas mempunyai Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;
2. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan ;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang di berikan oleh Bupati.

a. Kondisi Kerja

Kabupaten Malinau memiliki potensi berupa potensi perikanan budidaya dan potensi usaha perikanan. Potensi perikanan budidaya meliputi perikanan budidaya air tawar berupa kolam/keramba. Sedangkan potensi usaha perikanan berupa usaha olahan dari ikan tawar.

(1) Potensi Perikanan Budidaya

Potensi budidaya kolam ikan air tawar dengan luas kolam ikan yang tercatat pada tahun 2022 mencapai $\pm 162,34$ Ha yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan dengan Desa

Malinau Seberang sebagai Minapolis dari Kawasan Minapolitan Kabupaten Malinau yang digaungkan untuk menjadi desa pariwisata, dimana Desa Kalamok, Desa Lubak Manis serta Desa Malinau Kota sebagai Hinterland Kawasan Minapolitan. Dengan jumlah pembudidaya yang produktif sebanyak 164 RTP dari jumlah keseluruhan pembudidaya perikanan di Kabupaten Malinau sebanyak 1179 Rumah Tangga Perikanan. Umumnya masyarakat pembudidaya ikan di Kabupaten Malinau sangat tergantung dengan air sungai, saat pasang dimana ketinggian air pasang dapat mengairi kolam dan sebagian kecil masyarakat pembudidaya ikan dengan kolam tadah hujan.

Perikanan Budidaya didukung dengan telah dibangunnya Balai Benih Ikan (BBI) Lokal yang berada di Kabupaten Malinau dengan kapasitas balai bisa mencapai 1 juta benih pertahun, untuk saat ini kebutuhan akan benih ikan air tawar berdasarkan permintaan dari desa bila di total mencapai 800 ribu ekor benih ikan air tawar pertahun, namun saat ini BBI belum mampu memproduksi secara maksimal dalam mencukupi kebutuhan benih, sementara itu BBI mempunyai tugas untuk membina UPR dan memenuhi ketersediaan benih bagi masyarakat pembudidaya air tawar baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

(2) Potensi Usaha Perikanan

Kabupaten Malinau adalah Kabupaten yang tidak bersentuhan langsung dengan laut akan tetapi merupakan daerah aliran sungai. Potensi Perikanan tangkap perairan umum didukung oleh keberadaan nelayan dengan jumlah nelayan pada tahun 2023 adalah 265 RTP. Disamping dukungan nelayan sarana pencari ikan berupa perahu pada tahun 2022 sejumlah 265 unit.

Potensi ikan olahan tersebar di wilayah Kabupaten Malinau antara lain desa Malinau Kota, desa Malinau Utara dan desa Malinau Barat. Ikan olahan seperti pentolan ikan, amplang ikan, ikan salai yang diproduksi dari kegiatan IRT dalam menopang perekonomian keluarga masih menggunakan teknologi sederhana Potensi olahan ikan didukung dengan keberadaan pengolah ikan pada tahun 2022 sejumlah 58 orang.

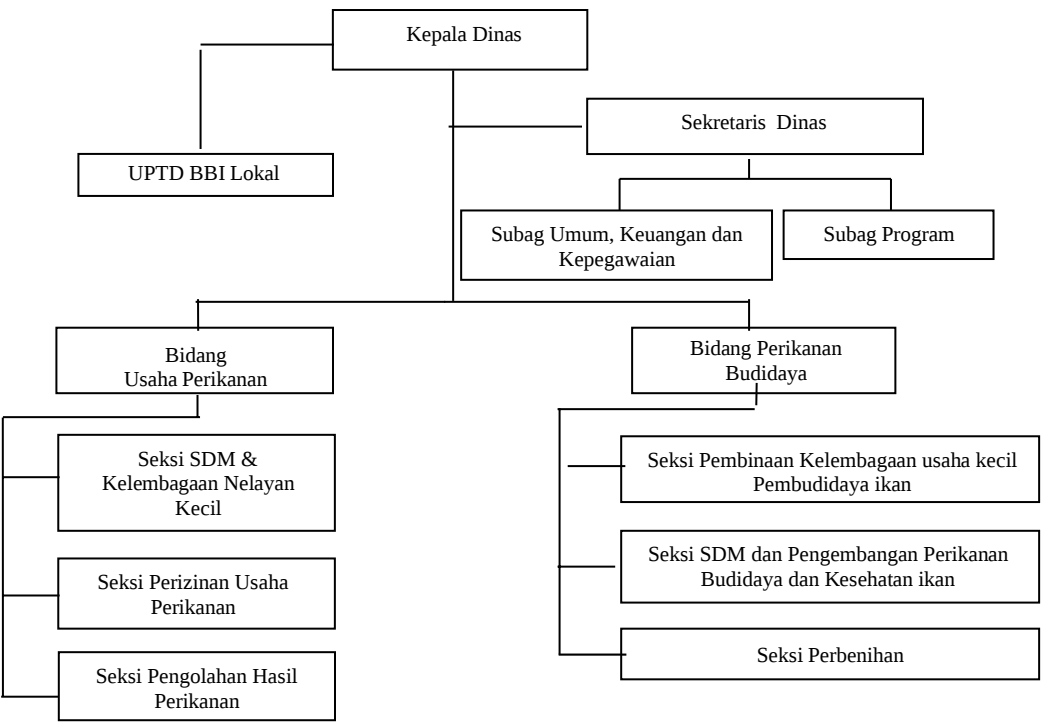
b. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Perikanan Kabupaten Malinau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016, sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program
- 3. Bidang Usaha Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - b. Seksi Perizinan Usaha Perikanan
 - c. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan
- 4. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
 - b. Seksi SDM dan Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan
 - c. Seksi Pembenihan dan Produksi Perikanan Budidaya
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya Bagian dan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau.

Gambar 1.1



Uraian tugas Kepala Dinas, sekretariat dan bidang - bidang Dinas Perikanan Kabupaten Malinau sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a) Menyusun program/rencana kerja Dinas Perikanan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c) Mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional dinas bersama Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d) Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
 - i) Menyusun rencana kebijaksanaan di bidang Perikanan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;

- j) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
- l) Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

b. Sekretariat mempunyai tugas :

Memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi.
- b) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.
- c) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan.
- d) Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan Laporan.
- e) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 sub bagian yaitu :

1) Subbagian Penyusunan Program

Kepala Subbagian penyusunan program mempunyai tugas yaitu melakukan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan program, merencanakan, melaksanakan, penyusunan rumusan program, koordinasi tugas pelayanan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas.

2) Subbagian umum, Keuangan dan Kepegawaian

Kepala subbagian umum, keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, keuangandan dukungan administrasi umum, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan adminsitasi urusan umum, Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas dan pengelolaan adminsitasi kepegawaian.

c. Bidang Usaha Perikanan

Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas yaitu : melaksanakan kebijakan dibidang seksi sumberdaya manusia dan kelembagaan nelayan kecil, seksi perizinan usaha perikanan dan seksi pengelolaan hasil perikanan.

Fungsi bidang usaha perikanan yaitu :

- a) Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan penerbitan SIUP di bidang Pembudidayaan ikan.
- b) Pengelolaan dan penyelenggaraan tepat pelelangan ikan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Perikanan memiliki 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan kecil yang memiliki tugas yaitumelakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan, fasilitasi kemitraaan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil.

2. Seksi Perizinan Usaha Perikanan memiliki tugas yaitu melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, TPUPI dan TPKPIH.
3. Seksi Pengolahan hasil Perikanan memiliki tugas yaitu melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

d. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya memiliki tugas yaitu melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia dan kelembagaan usaha budidaya ikan, pengembangan perikanan, budidaya dan pembenihan.

Dalam melaksanakan tugas bidang budidaya perikanan memiliki fungsi yaitu :

- a) Menyusun program dan kegiatan, melaksanakan penyiapan koordinasi dibidang sumberdaya manusia dan kelembagaan usaha budidaya ikan, pengembangan perikanan, budidaya dan pembenihan.
- b) Fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya memiliki 3 seksi yaitu :

1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha kecil pembudidayaan ikan memiliki tugas yaitu melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
2. Seksi SDM Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan memiliki fungsi yaitu Melakukan Pengumpulan data, Identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk budidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan

dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.

3. Seksi Pembenihan dan Produksi Perikanan Budidaya memiliki fungsi yaitu Melakukan Pengumpulan data, Identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk dan atau benih ikan.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan

Tugas pokok dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan yaitu melaksanakan penerapan dan bimbingan teknis, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu induk dan benih unggul serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas Balai Benih Ikan memiliki Fungsi yaitu :

- a) Penyediaan, perbanyakan dan distribusi induk unggul
- b) Pelaksanaan Produksi dan Distribusi benih unggul
- c) Penerapan Teknik perbenihan
- d) Pengendalian Mutu benih melalui penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan penerapan sistem jaminan mutu perbenihan
- e) Diseminasi penerapan teknis pembenihan ke masyarakat
- f) Pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan.

c. Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2023 dan Realisasi Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Malinau

Review terhadap pelaksanaan program pada Rencana Kerja Dinas Perikanan yang memenuhi Target Kinerja (Tingkat capaian program 100%) adalah program-program yang antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

4. Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/Kota)
5. Program Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Dana APBD II terdiri dari 3 Program dan 6 Kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp.5.056.503.146,- dengan penyerapan anggaran Rp. 4.568.605.737,- atau 90.35 % dengan realisasi fisik 97,02% secara keseluruhan kinerja pelayanan perangkat daerah sudah tercapai.

2.1.B. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Malinau.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam tabel 2.1 :

Tabel (T-C 29) 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Malinau

SKPD Dinas Perikanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.01	Urusan Pilihan									
3.01.3.01.01.01	Bidang Urusan Pemerintahan									
3.01.3.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran								
3.01.3.01.01.01.01	Pengadaan ATK	Jumlah Kebutuhan ATK	210 Jenis	120 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	100%	45 Jenis	210 Jenis	100%
3.01.3.01.01.01.01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan kantor	18 unit	18 unit	-	-	-	-	18 unit	100%
3.01.3.01.01.01.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM	1.200 liter	1.200 liter	-	-	-	-	1.200 liter	100%
3.01.3.01.01.01.01	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi (dalam dan luar)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	223 kali	150 kali	38 kali	38 kali	100%	35 kali	233 kali	100%

	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap								
3.01.3.01.01.01	Restocking Ikan	Jumlah Benih Ikan yang di Tebarkan di Perairan Umum	250.000 Ekor	-	101.010 Ekor	50.505 Ekor	100%	-	50.505 Ekor	50%
3.01.3.01.01.01	Pengadaan Alat Tangkap Ikan	Jumlah Alat Tangkap Ikan untuk Nelayan Tangkap	3 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	100%	1 Jenis	3 Jenis	100%
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase produksi perikanan budidaya								
3.01.3.01.01.01	Penyuluhan dan Pelatihan Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Tersuluh dan Terlatih	300 Orang	-	100 Orang	-	-	70 Orang	70 Orang	70%
3.01.3.01.01.01	Operasional UPTD Balai Benih Ikan (BBI)	Jumlah Kebutuhan BBM, Obat-obatan dan Pakan Ikan	91 Jenis	45 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	53 Jenis	58%
3.01.3.01.01.01	Program Pem bangunan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)	Persentase Produksi Benih Perikanan								
3.01.3.01.01.01	Rehabilitasi Kolam atau Bak Induk/calon induk (m) ²	Jumlah kolam atau bak induk/calon induk yang dapat difungsikan	3.177 m ²	1.180 m ²	602 m ²	602 m ²	100%	500 m ²	2.282 m ²	72 %
3.01.3.01.01.01	Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul	Jumlah calon induk ikan beserta pakan	3 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
3.01.3.01.01.01	Rehabilitas Saluran Air Pasok (Masuk) dan Keluar	Jumlah panjang saluran air pasok (Masuk) dan keluar	208 Meter	-	15 m	15 m	100%	175 Meter	208 Meter	100%

[illegible]

2.2. Analisis Kerja Pelayanan Dinas Perikanan

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel (T-C 30) 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten Malinau			254	265	276	288	252,27	397,2	276	288	
			a) Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	16 RTP	19 RTP	22 RTP	25 RTP	0	0	0	0	

			b) Presentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	0					
			c) Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah	0	0					
			d) Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/ Kemitraan Usaha/kemudahan akses iptek dan informasi / dan penguatan kelembagaan.	146 Orang						
			e) Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	151.000 Ekor						

Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau, Dinas Perikanan mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di bidang Usaha Perikanan, Bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Sejak terbentuknya Dinas Perikanan Kabupaten Malinau pada tahun 2017 memiliki 2 (dua) bidang yaitu Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Usaha Perikanan sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab melekat sesuai pada tupoksi Dinas Perikanan ada 2 indikator yaitu :

a. Produksi Perikanan Tangkap

Berdasarkan indikator kinerja utama *Produksi Perikanan Tangkap*, target produksi yang direncanakan sebesar 68 ton/tahun pada tahun 2021 dan target tersebut dapat terealisasi sebesar 96,8 ton atau lebih sebanyak 28,8 ton dari target yang telah ditetapkan, ini terlihat bahwa target produksi tidak terpenuhi dengan capaian kinerja hanya 105,46 % dengan hasil evaluasi kinerja dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

b. Produksi Perikanan Budidaya

Berdasarkan indikator kinerja utama *Produksi Perikanan Budidaya*, peningkatan produksi perikanan budidaya dengan target yang telah ditetapkan di RENSTRA 2016-2021 pada tahun 2021 sebesar 175 ton/tahun dan realisasi perikanan budidaya sebesar 120 ton atau kurang sebanyak 55 ton dari target yang telah ditetapkan, ini terlihat bahwa target produksi tidak terpenuhi dengan capaian kinerja hanya 68,57 % dengan hasil evaluasi kinerja dikategorikan ***Cukup Berhasil***.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2020 sebagai rencana program dan kegiatan dinas Perikanan Kabupaten Malinau yang disusun berdasarkan pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Pembangunan Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2021 mengarah pada peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan, baik produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun perikanan olahan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan. Peningkatan produksi perikanan ditunjang dengan kegiatan memasyarakat makan ikan yang bertujuan meningkatkan konsumsi ikan dimasyarakat.

Tercapainya target kinerja merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan dan sebagai upaya dalam mendukung peran peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sesuai dengan Misi Pembangunan Kabupaten Malinau 5 (lima) tahun kedepan tepatnya pada Misi ke 2 (dua) yaitu “ ***Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal*** ” dan sasaran RPJMD adalah *Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas yang berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal*” dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan dengan beberapa strategi khususnya yang berhubungan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas perikanan yaitu “ ***Meningkatnya Hasil Perikanan***”

Dengan strategi Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Sarana dan Prasarana secara berkelanjutan untuk Peningkatan Hasil Perikanan dan arah kebijakan Pengembangan, Perbaikan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan.

a. Permasalahan dan Hambatan

Adapun permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau antara lain :

1. Terbatasnya penyuluh perikanan yang pada tahun 2019 dapat bantuan penyuluh 1 (satu) orang dari pusat
2. Masih kurangnya ketersediaan benih ikan air tawar dan induk ikan unggul yang menjadi faktor kunci keberhasilan usaha budidaya perikanan
3. Balai Benih Ikan (BBI) belum optimal
4. Masih tingginya harapan pembudidaya ikan terhadap bantuan baik berupa stimulant maupun benih ikan dan pakan kepada pemerintah daerah
5. Kelompok pembudidaya perikanan yang dibentuk masyarakat banyak yang belum memiliki badan hukum (jumlah yang terdaftar 35 kelompok, jumlah kelompok yang berbadan hukum 14 kelompok)
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumber daya perikanan dimana masih banyak laporan dari masyarakat tentang penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan bahan yang dilarang
7. Minimnya sarana dan prasarana pengawasan untuk digunakan dalam pengawasan perairan umum
8. Masih rendahnya SDM dan sarana prasarana pengawasan perairan umum
9. Kenaikan harga pakan ikan mengakibatkan biaya operasional usaha budidaya ikan semakin tinggi dan mengurangi keuntungan usaha karena ketergantungan terhadap pakan masih cukup tinggi
10. Masih rendahnya pelaku usaha perikanan dalam mengakses layanan permodalan (tanda catat sampai dengan tahun 2019 sebanyak 11 orang)

b. Tantangan

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan pada dinas Perikanan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Biaya operasional yang tinggi pada usaha budidaya ikan yang mengakibatkan penurunan keuntungan
2. Daya saing penjualan hasil budidaya ikan sangat rendah dikarenakan harga ikan yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat bersaing dengan harga pasar luar daerah
3. Masuknya komoditi perikanan dari luar daerah
4. Keterbatasan pelaku usaha perikanan untuk mengakses layanan permodalan
5. Illegal fishing yang menggunakan alat dan bahan tidak ramah lingkungan masih cukup tinggi
6. Masih adanya hasil tangkapan ikan baik yang dari luar dan dalam daerah yang dipasarkan mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi.

c. Peluang

Peluang dalam mendukung peningkatan pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Malinau antara lain :

1. Tersedianya potensi perikanan
 2. Komoditas perikanan yang beraneka ragam
 3. Adanya program nasional dibidang perikanan dan kelautan serta kerjasama dengan pihak swasta dan stakeholder lainnya.
 4. Terbukanya akses pemasaran, meningkatnya komoditas dan pengolahan hasil perikanan
- Dari permasalahan dan hambatan, tantangan serta peluang yang telah dijabarkan diatas, maka isu-isu penting yang muncul terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau antara lain :

a. Isu Lingkungan

Isu lingkungan merupakan indikasi dibutuhkannya pembangunan perikanan yang berkelanjutan untuk menjaga sumber daya perikanan di Kabupaten Malinau . Isu-isu yang teridentifikasi adalah :

- Kualitas air mengalami penurunan dikarenakan kepekatan air mengalami kenaikan akibat lumpur dari aktifitas tambang di bagian hulu sungai
- Pemanfaatan perairan umum yang kurang bertanggungjawab seperti penggunaan alat dan bahan yang dilarang untuk penangkapan ikan

b. Isu Kelembagaan

Isu kelembagaan muncul terkait dengan kapasitas sumber daya manusia dibidang perikanan yang belum optimal.

Isu-isu yang teridentifikasi adalah :

- Perlunya penguatan kapasitas kelompok atau pelaku usaha bidang perikanan
- Perlunya mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengawasan (POKMASWAS)
- Perlunya penguatan kapasitas tenaga kerja teknis di UPTD BBI Kaliamok
- Perlunya pengawasan amdal dan perusahaan tambang/industri yang membuang air limbah kesungai
- Perlunya peningkatan petugas teknis Perikanan dalam jumlah dan kualifikasi

c. Isu infrastruktur

Isu infrastruktur terkait belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan produksi budi daya dan nelayan. Isu-isu yang teridentifikasi adalah :

- Perlunya rehabilitas sarana dan prasarana kolam BBI Kaliamok
- Kurangnya sarana prasarana penangkapan ikan untuk nelayan kecil
- Perlunya pelabuhan bongkar muat ikan di Minapolitan
- Sarana dan prasarana pembudidaya ikan belum optimal
- Belum adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam mengawal rangka program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Rancangan awal RKPD Kabupaten Malinau tahun 2024 tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Program Rencana Kerja Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2024 meliputi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk tahun 2024 tidak terdapat perbedaan jumlah anggaran yang signifikan antara program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan. Secara rinci perubahan atau perbedaan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel (T-C 31) 2.4
Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Malinau

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Perikanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	8 Nilai Sakip	4.221.778.808	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Perikanan	Nilai SAKIP Perang kat Daerah	8 Nilai sakip	4.221.778.808	Pelaksanaan Urusan Dinas selama 1 tahun
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Dinas Perikanan</i>	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</i>	<i>12</i> <i>Laporan</i>	<i>3.673.365.600</i>	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Dinas Perikanan</i>	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangka t daerah yang tepat waktu</i>	<i>12</i> <i>laporan</i>	<i>3.673.365.600</i>	<i>Laporan keuangan Dinas selama 1 Tahun</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	28 Orang/bulan	3.673.365.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	28 Orang/bulan	3.673.365.600	Pemberian Gaji dan Tunjangan aSN 28 Orang
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Dinas Perikanan</i>	<i>Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</i>	<i>2</i> <i>Paket</i>	<i>534.113.208,00</i>	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Dinas Perikanan</i>	<i>Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</i>	<i>2</i> <i>Paket</i>	<i>534.113.208</i>	<i>Perjalanan Dinas dan ATK Kantor</i>

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	1 Paket	40.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	1 Paket	40.000.000	Pengadaan Logistik dan ATK kantor : 42 Jenis dalam 1 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	8.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	8.000.000	Fotocopy 3.000 Lembar
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	451.113.208	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	451.113.208	Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Dinas Perikanan</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</i>	<i>1 Unit</i>	<i>14.300.000,00</i>	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Dinas Perikanan</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</i>	<i>1 Unit</i>	<i>14.300.000,00</i>	<i>Kendaraan Roda 4 milik dinas Perikanan</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	14.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	14.300.000	Biaya Pemeliharaan kendaraan roda 4
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kab. Malinau	persentase pencapaian target Produksi perikanan tangkap	100 %	525.000.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kab. Malinau	persentase pencapaian target Produksi perikanan tangkap	100 %	525.000.000	Target Produksi perikanan tangkap Tahun 2023 adalah 72 Ton
	<i>Kegiatan pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota</i>	2 kecamatan	jumlah kelompok perikanan tangkap penerima manfaat	5 Kelompok	525.000.000	<i>Kegiatan pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota</i>	2 kecamatan	jumlah kelompok perikanan tangkap penerima manfaat	5 Kelompok	525.000.000	Kelompok sasaran perikanan Tangkap adalah 5 kelompok
	sub kegiatan penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	Kab. Malinau	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam satu Kabupaten / Kota yang tersedia	1 Dokumen	25.000.000	sub kegiatan penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	Kab. Malinau	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam satu Kabupaten / Kota yang tersedia	1 Dokumen	25.000.000	Pembuatan Dokumen Statistik

	sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan Tangkap	Kab. Malinau	Jumlah sarana usaha Perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	2 unit	50.000.000	sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan Tangkap	Kab. Malinau	Jumlah sarana usaha Perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	2 Unit	50.000.000	Penebaran benih ikan di perairan umum 2 unit untuk 2 Jenis Ikan berjumlah 50.505 ekor
		Kec. Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota		85 unit	200.000.000		Kec. Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota		85 Unit	200.000.000	Pengadaan Jala 86 unit
		Kec. Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota		37 Unit	250.000.000		Kec. Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota		37 Unit	250.000.000	Pengadaan Mesin ketinting dan Perahu 31 unit
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kab. Malinau	persentase pencapaian target Produksi perikanan budidaya	100 %	1.195.000.000, 00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kab. Malinau	persentase pencapaian target Produksi perikanan budidaya	100 %	1.245.000.000,00	Target Produksi perikanan Budidaya Tahun 2023 adalah 193 Ton
	<i>Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil</i>	3 Kecamatan	<i>Jumlah Kelompok yang mendapatkan pendampingan dalam pembudidayaan ikan</i>	<i>8 Kelompok</i>	<i>105.000.000,00</i>	<i>Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil</i>	3 Kecamatan	<i>Jumlah Kelompok yang mendapatkan pendampingan dalam pembudidayaan ikan</i>	<i>8 Kelompok</i>	<i>155.000.000,00</i>	<i>Kelompok Sasaran merupakan kelompok perikanan budidaya yaitu 8 kelompok</i>
	sub kegiatan Pemberian Pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kec. Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota, Kec. Malinau Barat	Jumlah Kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 Kelompok	45.000.000	sub kegiatan Pemberian Pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kec. Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota, Kec. Malinau Barat	Jumlah Kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 Kelompok	95.000.000	Pelatihan Perikanan : 70 Orang untuk 3 Kelompok
		Kec. Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota, Kec. Malinau Barat		8 Kelompok	60.000.000		Kec. Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota, Kec. Malinau Barat		8 Kelompok	60.000.000	Pengadaan Tenaga Penyuluh Perikanan 2 Orang untuk 8 Kelompok

	<i>kegiatan Pengelolaan pembudidaya ikan</i>	<i>Kab. Malinau</i>	<i>Jumlah benih yang dapat diproduksi dan di tebar</i>	<i>900.000 Ekor</i>	<i>1.090.000.000</i>	<i>kegiatan Pengelolaan pembudidaya ikan</i>	<i>Kab. Malinau</i>	<i>Jumlah benih yang dapat diproduksi dan di tebar</i>	<i>900000 Ekor</i>	<i>1.090.000.000,00</i>	<i>Produksi Benih ikan air tawar di Balai benih ikan air tawar dan jumlah benih ikan yang di tebar pada kolam - kolam pembudidaya ikan</i>
	sub kegiatan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Kab. Malinau	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	25.000.000	sub kegiatan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Kab. Malinau	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	25.000.000	Pembuatan Dokumen Statistik Budidaya
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	BBI Kaliyamok	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	1 paket	250.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	BBI Kaliyamok	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	1 paket	250.000.000	Pembuatan Pagar BBI dengan volume 1000 M
		BBI Kaliyamok	Jumlah sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	1 Unit	88.170.000		BBI Kaliyamok	Jumlah sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	1 unit	88.170.000	Pengadaan 10 Jenis Obat Ikan untuk 1 Unit BBI
		BBI Kaliyamok		1 paket	50.000.000		BBI Kaliyamok		1 paket	50.000.000	Rehabilitasi lantai bangsal Pembenihan (Hatchery) 133 M BBI
		BBI Kaliyamok		5 Unit	50.000.000		BBI Kaliyamok		5 unit	50.000.000	Pengadaan pakan benih ikan 400 kg BBI
		BBI Kaliyamok		1 Unit	2.000.000		BBI Kaliyamok		1 unit	2.000.000	Pengadaan BBM : 200 Liter untuk 1 Unit BBI
		BBI Kaliyamok		1 Unit	56.000.000		BBI Kaliyamok		4000 Kg	56.000.000	Pengadaan Pakan ikan BBI : 4.000 Kg untuk 1 Unit BBI

		BBI Kaliamok		1 Unit	53.830.000		BBI Kaliamok		1 Unit	53.830.000	Pengadaan Induk lakan BBI : 413 ekor untuk 1 Unit BBI
		Kab. Malinau		3 Unit	200.000.000		Kab. Malinau		3 unit	200.000.000	Paket Budidaya kolam terpal lele
		Kab. Malinau		1 Unit	195.000.000		Kab. Malinau		1 unit	195.000.000	Paket Penyediaan Sarana dan Prasarana UPR ikan Lele : 1 UPR
		Kab. Malinau		1 Unit	120.000.000		Kab. Malinau		1 unit	120.000.000	Penunjang Kegiatan DAK Kelauatan dan Perikanan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malinau. Usulan kegiatan masyarakat tahun 2024 pada umumnya selaras dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas Perikanan Kabupaten Malinau. Usulan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bantuan benih ikan dan sarana dan prasarana budidaya merupakan program dalam meningkatkan produktivitas perikanan budidaya dan memfasilitasi pengembangan usaha budidaya ikan air tawar.
- b. Sarana dan alat bantu penangkapan ikan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap sesuai dengan kebutuhan nelayan.

Usulan kegiatan masyarakat tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan yang perlu diperhatikan baik pembudidaya yang berbentuk kelompok dan perorangan harus berbadan hukum sesuai dengan amanat Permen KP nomor 70 /Permen-KP/2016.

Rekapitulasi usulan program / kegiatan dari masyarakat tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut :

Tabel (T-C 32) 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Malinau

Dinas Perikanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
1	Bantuan Sarana Tangkap Nelayan	Malinau Kota RT. 01	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	20	Orang	terakomodir
2	Bantuan Sarana Tangkap Nelayan	Malinau Kota RT. 11	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1	Paket	terakomodir
3	Pengadaan Bibit Ikan Patin, Lele	Malinau Barat Kuala Lapang	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	Kegiatan	terakomodir
4	Pengadaan Pakan Ikan	Malinau Barat Kuala Lapang	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	Kegiatan	terakomodir
5	PENGADAAN BIBIT IKAN NILA + PAKAN	Malinau Utara Luso	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10.000	Ekor	terakomodir
6	PENGADAAN KETINTING NELAYAN	Malinau Utara Semenggaris	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	Paket	terakomodir
7	Pengadaan bibit ikan lele dan patin 3 kelompok Tani (budi daya peternakan)	Mentarang Long Bisai	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	50.000	ekor	terakomodir
8	Pengadan bibit ikan lele	Mentarang Pulau Sapi	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5.000	ekor	terakomodir
9	Pengadaan Ikan Lele	Masehi Setarap	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1.000	ekor	terakomodir
10	Pengadaan Bibit Ikan Patin, Lele, Nila	Masehi Punan Adiu	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10.000	Ekor	terakomodir
11	Pengadaan Bibit Ikan Lele, Terpal & Pakan	Pujungan Long Jelet	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	Paket	Tidak dapat terakomodir
12	Budidaya Ikan Lele	Sungai Boh Mahak Baru	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	paket	Tidak dapat terakomodir
13.	Budidaya Ikan Patin	Sungai Boh Mahak Baru	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	paket	Tidak dapat terakomodir
14.	Budidaya Ikan Patin	Sungai Boh Mahak Baru	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	paket	Tidak dapat terakomodir
15	Bantuan Biaya Kelompok Tani	Sungai Boh Mahak Baru	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1	paket	Tidak dapat terakomodir
16	Bantuan Biaya Kelompok Nelayan Ikan	Sungai Boh Mahak Baru	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1	Kelompok	Tidak dapat terakomodir
17	Pembuatan Kolam Ikan	Sungai Boh Data Baru	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	paket	Tidak dapat terakomodir
18	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Sungai Boh Dumu Mahak	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	paket	Tidak dapat terakomodir
19	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Sungai Boh Dumu Mahak	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	paket	Tidak dapat terakomodir

20	Pengadaan Bibit Ikan Lele, Ikan Patin, Ikan Nila	Kayan Hulu Long Payau	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2.000 ekor	Tidak dapat terakomodir
21	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Bahau Hulu Long Tebulo	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10.000 ekor	Tidak dapat terakomodir
22	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Bahau Hulu Long Temuat	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10.000 ekor	Tidak dapat terakomodir
23	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Kayan Selatan Long Ampung	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	8.000 ekor	Tidak dapat terakomodir
24	Pengadaan Bibit Ikan Mas	Kayan Selatan Metulang	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	15.000 ekor	Tidak dapat terakomodir
25	Pengadaan Bibit Ikan Mas dan ikan patin	Kayan Selatan Sungai Barang	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	30.000 ekor	Tidak dapat terakomodir

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah ” Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diwujudkan melalui 9 (Sembilan) yang dikenal sebagai (Nawacita), Misi pembangunan yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Kerangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dirumuskan lebih lanjut dalam 7 (Tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional yaitu :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- 7) Meningkatkan Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan Transformasi pelayanan publik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah "Kemaritiman dan Kelautan" dan "Kedaulatan Pangan". Selanjutnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu "Mewujudkan Kedaulatan dalam Mengelola Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah "***mewujudkan sektor kelautan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan Nasional***"

Misi:

1. Kedaulatan, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau.

3.2.1. Tujuan

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan tujuan

Perikanan yaitu :

1. Meningkatkan Produksi Perikanan
2. Meningkatkan Pelayanan Dinas Perikanan

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Malinau antara lain :

1. Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya perikanan
2. Meningkatnya pelayanan Dinas Perikanan

3.2.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utaramengacu pada Visi Provinsi Kalimantan Utara adalah ” **Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera**”.

Misi ;

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan

berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;

4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;

13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Misi yang ke Enam, Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota. dan upaya dari misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Hasil dari Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Faktor Pendorong :

- a. Potensi sumber daya alam dengan baik dan pengembangan sumberdaya manusia dibidang perikanan dan kelautan cukup besar
- b. Ketersediaan lahan untuk perikanan air tawar dan air payau
- c. Keuletan nelayan yang cukup tinggi
- d. Sumber ikan laut yang melimpah
- e. Produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis
- f. Terbukanya kerjasama dengan pihak investor

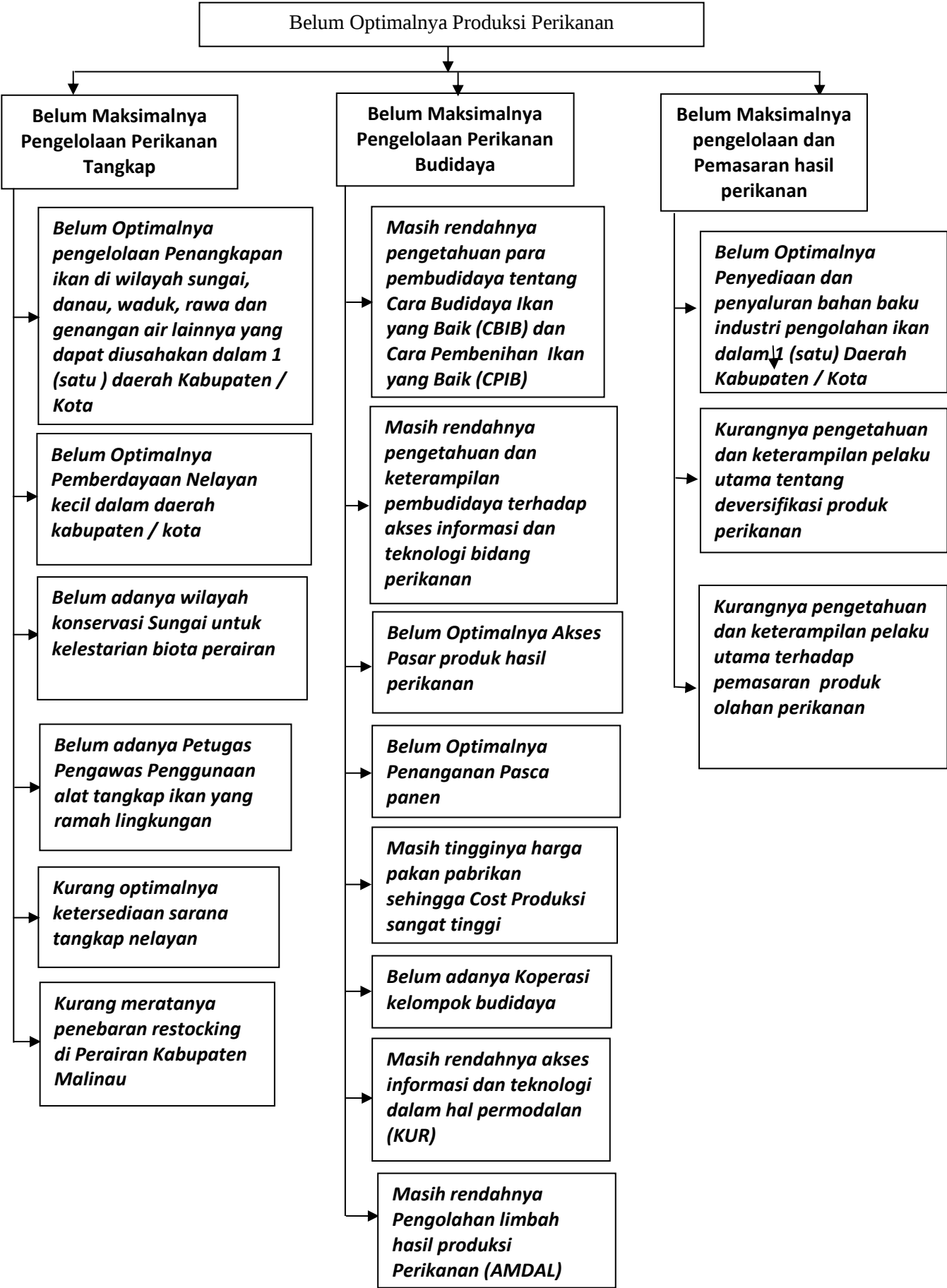
2) Faktor Penghambat

- a. Pemasaran hasil yang belum optimal
- b. Ketiadaan bibit/benih ikan

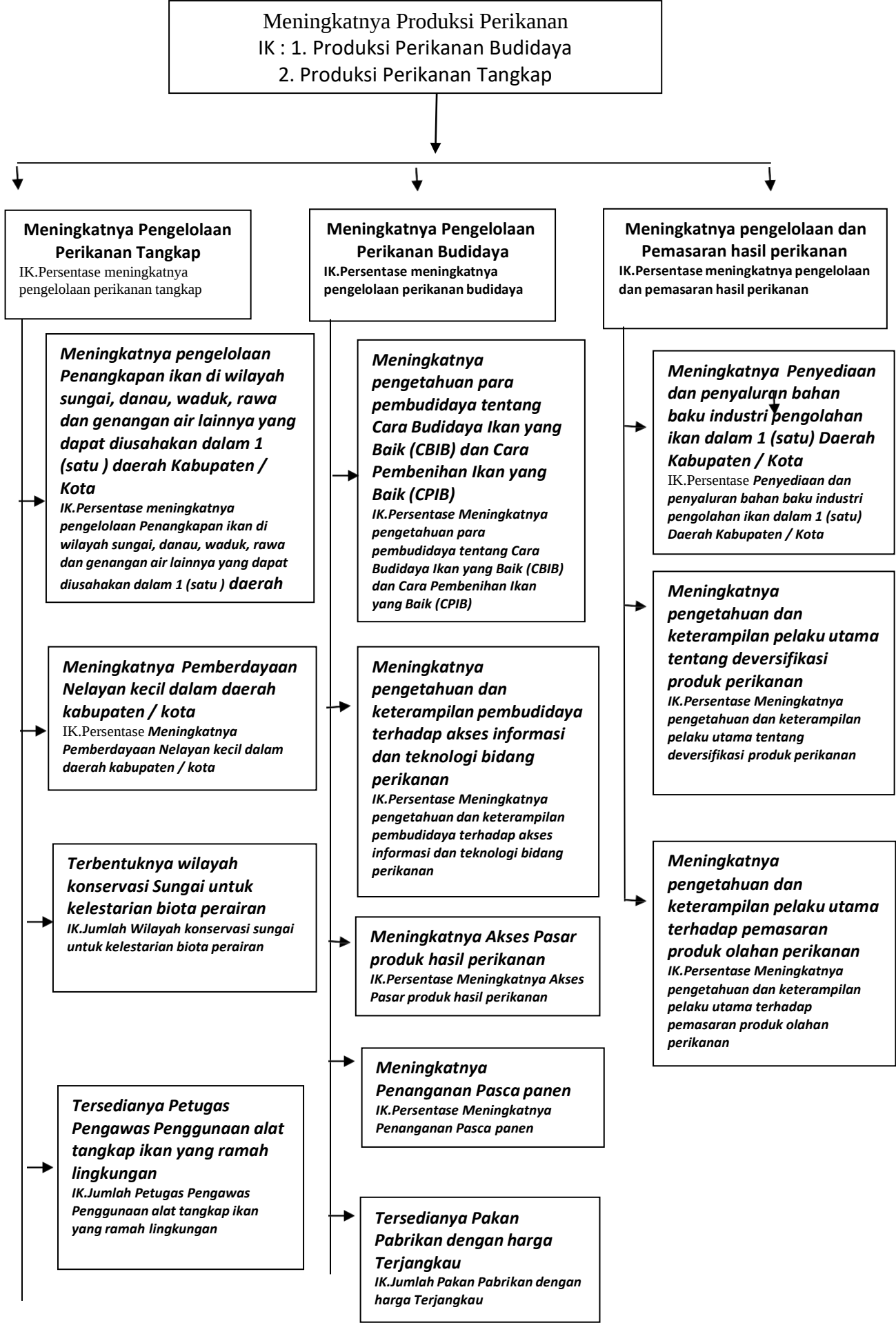
- c. Kemampuan sumberdaya manusia belum optimal
- d. Sarana dan prasarana penangkapan ikan belum optimal
- e. Belum optimalnya peran kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan

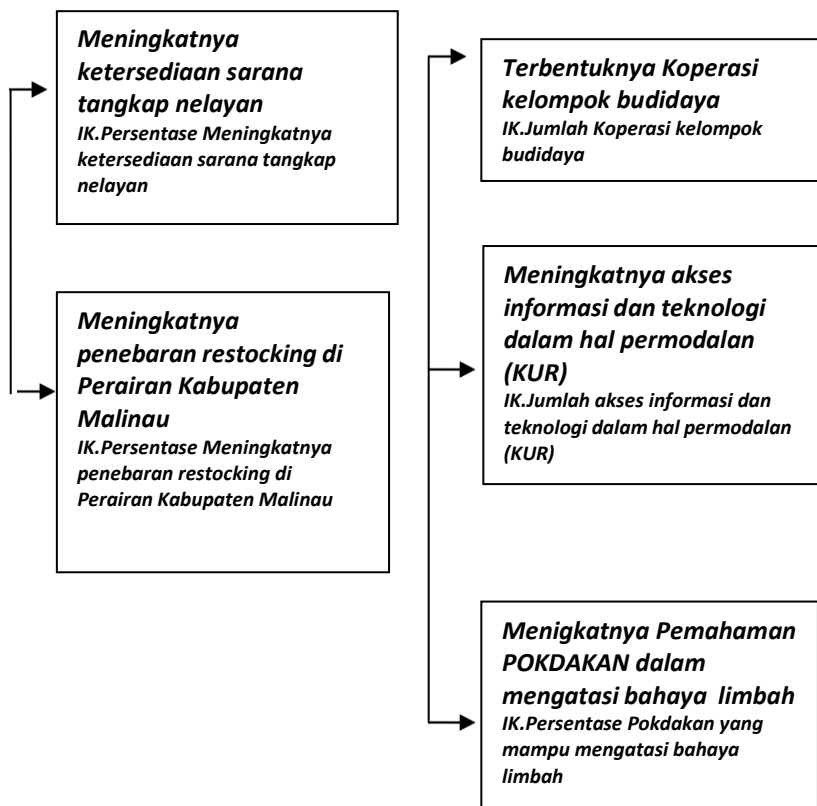
Selaras dengan kebijakan prioritas nasional dan provinsi yang mengacu juga kepada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 adalah mengembangkan klaster-klaster pertanian, perikanan dan perkebunan pada kawasan-kawasan tertentu sesuai dengan potensi wilayah termasuk pengembangan kawasan minapolitan dan agropolitan maka Dinas Perikanan Kabupaten Malinau menetapkan dan menentukan arah kebijakan yaitu ***Pengembangan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan.*** Dengan menyusun rencana program dan kegiatan guna mencapai tujuan dari misi yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

Pohon Masalah



POHON KINERJA





3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Prioritas)

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perikanan pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel (T-C 33) 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2024
dan perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Malinau

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikator (000)
3	Urusan Pemerintahan Pilihan								
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan								
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan								
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	persentase pencapaian target Produksi perikanan tangkap	Kab. Malinau	100 %	525.000.000	APBD II	Target Produksi perikanan tangkap Tahun 2023 adalah 72 Ton	100 %	525.000.000
3.25.03.2.01	Kegiatan pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	jumlah kelompok perikanan tangkap penerima manfaat	2 kecamatan	5 Kelompok	525.000.000	APBD II	Kelompok sasaran perikanan Tangkap adalah 5 kelompok	5 Kelompok	525.000.000

3.25.03.2.01.01	sub kegiatan penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam satu Kabupaten / Kota yang tersedia	Kab. Malinau	1 Dokumen	25.000.000	APBD II	Pembuatan Dokumen Statistik	1 Dokumen	25.000.000
3.25.03.2.01.03	sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha Perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	Kab. Malinau, Kec. Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota	123 unit	500.000.000	APBD II	Penebaran benih ikan di perairan umum 2 unit untuk 2 Jenis Ikan berjumlah 50.505 ekor, Pengadaan Jala 86 Unit, Pengadaan Mesin Ketinting dan Perahu 31 Unit	123 Unit	500.000.000
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	persentase pencapaian target Produksi perikanan budidaya	Kab. Malinau	100 %	1.126.586.792,00	APBD II	Target Produksi perikanan Budidaya Tahun 2023 adalah 193 Ton	100 %	1.245.000.000,00
3.25.04.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil</i>	<i>Jumlah Kelompok yang mendapatkan pendampingan dalam pembudidayaan ikan</i>	3 Kecamatan	11 Kelompok	125.000.000,00	APBD II	<i>Kelompok Sasaran merupakan kelompok perikanan budidaya yaitu 8 kelompok</i>	11 Kelompok	155.000.000,00
3.25.04.2.02.04	sub kegiatan Pemberian Pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota, Kec. Malinau Barat	11 Kelompok	125.000.000	APBD II	Pelatihan Perikanan : 70 Orang untuk 3 Kelompok	11 Kelompok	155.000.000
3.25.04.2.04	<i>kegiatan Pengelolaan pembudidaya ikan</i>	<i>Jumlah benih yang dapat diproduksi dan di tebar</i>	<i>Kab. Malinau</i>	<i>900.000 Ekor</i>	<i>1.001.586.792</i>	<i>APBD II</i>	<i>Produksi Benih ikan air tawar di Balai benih ikan air tawar dan jumlah benih ikan yang di tebar pada kolam - kolam pembudidaya ikan</i>	<i>900.000 Ekor</i>	<i>1.090.000.000,00</i>

3.25.04.2.04.01	sub kegiatan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Malinau	1Dokumen	25.000.000	APBD II	Pembuatan Dokumen Statistik Budidaya	1Dokumen	25.000.000
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	BBI Kalamok	1unit	230.000.000	APBD II	Perbaikan 4 unit kolam dengan volume 714 M2	4Unit	250.000.000
3.25.04.2.04.04	Sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	BBI Kalamok	7Unit	746.586.792	APBD II	-Pengadaan 10 Jenis Obat Ikan untuk 1 Unit BBI -Pengadaan Alat Laboratorium BBI -Pengadaan Peralatan BBI -Pengadaan BBM: 200 Ltr Untuk 1 Unit BBI -Pengadaan Pakan Ikan BBI: 4.000 Kg Untuk 1 Unit BBI -Pengadaan Induk Ikan BBI: 194 ekor untuk 1 Unit BBI -Paket Budidaya Kolam Terpal Lele -Paket Penyediaan Sarana dan Prasarana UPR ikan lele: 1 UPR -Penunjang Kegiatan DAK Kelautan dan Perikanan	19unit	815.000.000
Jumlah					1.651.586.792				1.770.000.000

BAB IV

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi serta kebijakan yang telah diuraikan di depan, disusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, Target capaian Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode Rencana Kerja Dinas Perikanan pada tahun 2024.

Rencana Program dan Kegiatan prioritas pembangunan sektor perikanan periode 2024 dan program prioritas beserta pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 4. Sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Malinau

No.	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Perikanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	8 Nilai Sakip	3.930.718.808
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Dinas Perikanan</i>	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</i>	12 Laporan	3.673.365.600
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	28 Orang/bulan	3.673.365.600
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Dinas Perikanan</i>	<i>Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</i>	2 Paket	243.053.208,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	1 Paket	40.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	8.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	195.053.208

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	1 Unit	14.300.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	14.300.000
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kab. Malinau	persentase pencapaian target Produksi perikanan tangkap	100 %	525.000.000
	Kegiatan pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	2 kecamatan	jumlah kelompok perikanan tangkap penerima manfaat	5 Kelompok	525.000.000
	sub kegiatan penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	Kab. Malinau	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam satu Kabupaten / Kota yang tersedia	1 Dokumen	25.000.000
	sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan Tangkap	Kab. Malinau	Jumlah sarana usaha Perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	2 unit	50.000.000
		Kec. Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota		86 unit	200.000.000
		Kec. Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota		31 Unit	250.000.000
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kab. Malinau	persentase pencapaian target Produksi perikanan budidaya	100 %	1.195.000.000,00
	Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	3 Kecamatan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan pendampingan dalam pembudidayaan ikan	8 Kelompok	105.000.000,00
	sub kegiatan Pemberian Pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kec. Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota, Kec. Malinau Barat	Jumlah Kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 Kelompok	45.000.000
		Kec. Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota, Kec. Malinau Barat		8 Kelompok	60.000.000

	<i>kegiatan Pengelolaan pembudidaya ikan</i>	<i>Kab. Malinau</i>	<i>Jumlah benih yang dapat diproduksi dan di tebar</i>	<i>900.000 Ekor</i>	<i>1.090.000.000</i>
	sub kegiatan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Kab. Malinau	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	25.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	BBI Kaliamok	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	4 unit	250.000.000
		BBI Kaliamok	Jumlah sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	1 Unit	88.170.000
		BBI Kaliamok		5 Unit	50.000.000
		BBI Kaliamok		5 Unit	50.000.000
		BBI Kaliamok		1 Unit	2.000.000
		BBI Kaliamok		1 Unit	56.000.000
		BBI Kaliamok		1 Unit	53.830.000
		Kab. Malinau		3 Unit	200.000.000
		Kab. Malinau		1 Unit	195.000.000
		Kab. Malinau		1 Unit	120.000.000
				TOTAL	5.650.718.808

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perikanan dalam menunjang tercapainya Visi, Misi dan Strategi serta target dan sasaran Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah kabupaten Malinau Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau sebagai bahan dalam menyusun usulan rencana kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD I, APBD II DAN APBN/DAK Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025 kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan rencana kerja anggaran tahun 2025.

Akhirnya harapan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi salah satu media interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mendukung terlaksananya program pembangunan Kabupaten Malinau dengan visi Mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). Demi penyempurnaan renstra ke depan, umpan balik dan saran dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami harapkan. Akhirnya kami mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan YME atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan ini dapat tersusun dan semoga menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan pembangunan sector perikanan di Kabupaten Malinau.

Malinau, Maret 2024

Kepala Dinas



Muhamad Kadri, S.Sos., M.Si

Nip. 19670717 199803 1 004